

Better Policies Better Lives™

Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik

Pengalaman Riset dan Advokasi
Mitra Knowledge Sector Initiative



Penulis

Agus Pratiwi, Ahmad Jaetuloh, Amalia Puri Handayani, Ana Rosidha Tamyis, Andi Sri Wulandari, Ankarlina Pandu Primadata, Antoni Tsaputra, Aprilia Ambarwati, Arina, Benedicta Rahmawati Kirana Kusuma Wardhani, Charina Chazali, Dani Alifah Devika, Dian Kartika Sari, Dina Afrianty, Dina Mariana, Dwi Joko Widiyanto, Dwindi Nur Oceani, Dyan Widyaningsih, Edwin Sutamto, Elly Malihah, Elghafiky Bimardhika, Eric Sindunata, Fatum Ade, Gaby Gabriela Langi Gumilang Sahadewo, Hardiyani Puspita Sari, Henny Rosalinda, Ignatius Praptoraharjo, Irwanto, Jackie Viemilawati, Keppi Sukesi, Liana Andiani, Lidwina Inge Nurtjahyo, Made Diah Negara, Marifatul Amalia, Medelina K Hendytio, Milda Irhamni, Misiyah, Nani Zulminarni, Nidia Muryani, Niken Kusumawardhani, Nurhady Sirimorok, Prani Sastiono, Primatia Romana Wulandari, Rezanti Putri Pramana, Rika Kumala Dewi, Rima Prama Artha, Rivandra Royono, Sandra Frans, Seto, Silvia Devina, Sotyania Wardhiana, Siti Ruhanawati, Slamet Thohari, Sri Sukarni, Emy Susanti, Tyas Retno Wulan, Wahidah Rustam, Wahyu Susilo

Organisasi Mitra

Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), AKATIGA, Article 33 Indonesia, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Institute of Community Justice (ICJ) Makassar, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, J-PAL SEA Universitas Indonesia, Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, PPDJ Padang, PUI-PT PPH Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial Unika Atma Jaya, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Rumah KitaB, Sajogyo Institute, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman, SurveyMETER, The SMERU Research Institute, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Yayasan BaKTI, Yayasan Plan International Indonesia

Penerbit

Knowledge Sector Initiative



2022

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pandangan dan temuan yang terdapat dalam publikasi ini murni berasal dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia, Knowledge Sector Initiative maupun mitra pelaksana. Semua pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari, atau sehubungan dengan, materi yang terkandung dalam publikasi ini.

Prakata

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan memperkuat pembuatan kebijakan berbasis bukti untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Selama menjalankan program *knowledge-to-policy*, atau proses pengetahuan ke kebijakan di Indonesia, KSI menghargai dan menyuarakan praktik riset dan advokasi tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion/GEDSI*) yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi. Selain itu, KSI juga menggarisbawahi pentingnya pengetahuan lokal termasuk pengalaman dari suara dari perempuan, orang dengan disabilitas, dan kelompok marginal.

GEDSI merupakan bagian penting dalam pekerjaan KSI, karena kebijakan publik yang lebih inklusif sangat dibutuhkan jika Indonesia ingin mencapai target pengurangan kemiskinan dan terus tumbuh secara ekonomi yang berkelanjutan. Strategi KSI dalam mengarusutaman perspektif GEDSI dalam penyusunan kebijakan adalah kerja sama dengan mitra dan pemangku kepentingan KSI untuk mengintegrasikan prinsip dan praktik yang mempromosikan GEDSI dalam penelitian dan dialog kebijakan. Melalui kemitraan ini, KSI mendukung mitra untuk mengarusutamakan perspektif GEDSI guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berperspektif GEDSI.

Selama fase dua KSI, KSI bersama mitra sudah menghasilkan 46 produk pengetahuan inklusif yang menekankan pengarusutamaan GEDSI untuk memperkuat transformasi ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, adil, merata, dan tepat sasaran.

Buku ini berisi kumpulan pengalaman mitra-mitra KSI dalam menerapkan perspektif GEDSI dalam riset dan advokasi mereka. Topik pengalaman yang dikumpulkan dalam buku ini beragam, dari riset dan advokasi untuk perempuan korban kekerasan, disabilitas, buruh migran, petani-petani muda, perempuan di perdesaan, hingga korban perkawinan anak.

Buku ini dihasilkan melalui proses *collaborative writing* yang cukup panjang dan melibatkan mitra-mitra KSI dari kalangan lembaga riset, perguruan tinggi, dan organisasi

masyarakat sipil, beserta mitra dari program DFAT yang lain seperti, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), *Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase II (AIPJ II)*, *Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia (J-PAL SEA)*, dan *Indonesia Australia Partnership for Infrastructure (KIAT)*. Latar belakang penulis juga beragam: fasilitator dan pendamping program di lapangan, peneliti, dosen, danguru besar dari beberapa perguruan tinggi.

Di antara keberagaman penulis dan isu, muncul tujuan yang sama, yakni bagaimana mengupayakan riset dan advokasi yang menerapkan perspektif kesetaraan gender, inklusi sosial, dan kelompok marginal untuk kebijakan yang lebih terbuka dan inklusif. KSI mendedikasikan buku ini sebagai sumber belajar dan referensi pengetahuan bagi publik dan pembuat kebijakan/*policymakers* yang ingin mendalami isu-isu pemberdayaan perempuan, disabilitas, dan penguatan kelompok marginal.

Akhir kata, kami sampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik: Pengalaman Riset dan Advokasi Mitra Knowledge Sector Initiative ini dapat bermanfaat dan mempercepat penerapan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam proses penyusunan kebijakan di Indonesia.

Jana Hertz

Team Leader KSI

Sambutan

Pandemi COVID-19 secara nyata berdampak negatif terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan manusia di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Australia. Perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum marginal lainnya merupakan salah satu kelompok yang paling terkena dampak ekonomi dan sosial yang terjadi akibat pandemi. Sebagai negara penandatangan *1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, *1990 Convention on the Rights of Child*, dan *2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Australia dan Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan upaya-upayanya untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi dari krisis terhadap kelompok rentan ini.

Pemerintah Australia sebagai mitra pembangunan Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk mengarusutamakan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam semua kemitraan pembangunannya, termasuk di sektor pengetahuan. Pengarusutamaan GEDSI dilaksanakan sepanjang siklus masing-masing program, termasuk di masa pengembangan program, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia telah berkolaborasi dalam melaksanakan Knowledge Sector Initiative (KSI) yang ditujukan untuk mendukung penyusunan kebijakan di Indonesia dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan inklusif melalui pemanfaatan penelitian, data, dan analisis secara lebih baik. Selama masa pandemi, data-data dan hasil penelitian yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk yang dihasilkan melalui KSI, telah membantu pemerintah Indonesia dan para mitranya dalam merespon tantangan ekonomi dan sosial yang telah bermunculan. Peran para peneliti dan lembaga penelitian menjadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan penelitian yang berkualitas, termasuk penelitian yang secara efektif mempertimbangkan tantangan dan kesempatan yang berkaitan dengan GEDSI.

Buku ini disusun pada masa di mana peneliti di Indonesia semakin sering mengadopsi perspektif GEDSI di dalam penelitiannya. Kiat-kiat dalam mengarusutamakan perspektif GEDSI yang digambarkan di bagian pertama buku ini akan sangat berguna, tidak hanya bagi para peneliti, tapi juga bagi aparat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi pembangunan, dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penelitian-penelitian untuk memahami konteks dan keragaman isu-isu GEDSI di Indonesia. Bagian kedua dari buku ini memberikan gambaran mengenai berbagai temuan-temuan utama yang terlihat dari penelitian-penelitian yang telah diperkaya dengan pengarusutamaan aspek GEDSI maupun dari kegiatan-kegiatan advokasi yang telah didukung oleh data dan penelitian yang sensitif GEDSI. Bagian ini merupakan pengingat bahwa penelitian mengenai isu-isu GEDSI berperan penting dalam menginformasikan upaya-upaya pemerintah dalam mendukung hak-hak dasar dari perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum marginal lainnya.

Melalui KSI, Pemerintah Australia sangat senang telah mendukung penerbitan buku ini di waktu yang sangat tepat. Saya berharap buku ini berkontribusi positif terhadap proses yang diluncurkan dalam rangka pengembangan kebijakan publik dan program-program yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan buku ini terutama kepada tim KSI, para penulis dan lembaga mitra yang terlibat.

Selamat membaca!

Kirsten Bishop

Minister Counsellor, Governance and Human Development
Department of Foreign Affairs and Trade
Kedutaan Besar Australia Jakarta

Sambutan

Pemerintah Indonesia telah bertekad menjalankan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tekad ini diupayakan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada segmen masyarakat yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Pemerintah menyadari selama ini masyarakat marginal selalu menerima dampak dan beban ganda dalam setiap perubahan. Selama pandemi COVID-19, misalnya, ibu-ibu rumah tangga harus ikut menopang ekonomi rumah tangga akibat suaminya kehilangan pekerjaan, atau menanggung beban pembelajaran anak-anak mereka akibat penghentian kegiatan proses belajar-mengajar tatap muka di sekolah. Beban ganda ini bertambah berat pada segmen keluarga miskin dan keluarga yang hidup dalam ketimpangan relasi gender. Sementara itu, bagi para penyandang disabilitas, COVID-19 mempersulit mereka mengakses fasilitas kesehatan dan pelayanan publik.

Pemerintah mencoba mewujudkan tekad ini dengan melakukan reformasi kesehatan, perlindungan sosial, serta ketahanan pangan dan bencana. Pemerintah juga membuka diri untuk belajar dan mengadopsi praktik-praktik baik tentang bagaimana masyarakat dan daerah bertahan hidup menghadapi guncangan sosial-ekonomi.

Dalam situasi ketidakpastian seperti sekarang ini, tekad tersebut tidak bisa diwujudkan sendirian oleh pemerintah. Kerja sama dan komunikasi antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah perlu dibangun lebih intensif. Inovasi dan pembelajaran tentang bagaimana kebijakan atau program penguatan komunitas marginal perlu lebih sering dipertukarkan.

Saya menyambut baik inisiatif KSI menerbitkan buku Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik: Pengalaman Riset dan Advokasi Mitra Knowledge Sector Initiative ini. Buku yang ditulis secara kolaboratif oleh banyak aktivis dan peneliti baik lembaga swadaya masyarakat maupun perguruan tinggi ini akan menjadi sumber belajar

dan inspirasi yang penting untuk memperkuat paradigma pembangunan inklusif dan berkeadilan.

Buku ini bertujuan untuk memperkaya proses pengetahuan ke kebijakan dengan perspektif dari komunitas yang terpinggirkan dan untuk memberikan saran tentang bagaimana melibatkan aktor lain dalam prosesnya. Ada 30 kumpulan cerita yang menyoroti pentingnya mengintegrasikan pengetahuan ke kebijakan terutama dalam melibatkan kelompok rentan sebagai sumber pengetahuan dan advokat aktif.

Vivi Yulaswati

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia

Daftar Isi

Prakata	i
Sambutan	iii
Sambutan	v
Daftar Isi	vii
PENGANTAR	1
Integrasi dan Kolaborasi Pengetahuan untuk Kebijakan yang Lebih Inklusif.....	1
BAGIAN 1: RISET SENSITIF GENDER, DISABILITAS DAN INKLUSI SOSIAL	8
Kajian dan Advokasi Kebijakan Sensitif Gender dalam Perspektif Budaya Organisasi	9
Memproduksi Pengetahuan yang Lebih Terbuka	15
<i>Participatory Action Research</i> : Metode Riset Berperspektif Feminis	21
Protokol dan Etika Riset Sensitif Gender	26
Mengkonstruksikan Riset Sensitif GESI: Pesan dari Stigma Index 2.0 Indonesia ...	34
Mendengar Suara Perempuan dengan Lebih Baik: Pembelajaran dari Studi Longitudinal dalam Menggali Isu KDRT.....	39
Membangun Kapasitas Peneliti Komunitas	44
BAGIAN 2: ADVOKASI KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER, DISABILITAS DAN INKLUSI SOSIAL	50
2.1 MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.....	51
ICJ Makassar Mendorong Perda PPA Menjadi Inisiatif DPRD Kabupaten Bone.....	52
Stop Perkawinan Anak di Kalibaru.....	57
Penanganan Kekerasan Seksual dalam Kampus	62

2.2 LAYANAN KESEHATAN YANG INKLUSIF.....	68
Manajemen Kebersihan Menstruasi: Tanggung Jawab Siapa?.....	69
Penyandang Disabilitas dan Akses Terhadap Layanan Kesehatan.....	75
Semangat Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Advokasi Pemanfaatan Data SITEPAT RAMAH di Tingkat Desa	80
Merintis Jalan Advokasi Kesehatan Jiwa yang Inklusif.....	84
Dukungan Psikososial bagi Orang yang Hidup dengan HIV/AIDS.....	89
Melihat Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan dari Sudut Pandang Perempuan	94
2.3 AGRARIA.....	99
Perempuan dan Kedaulatan Agraria: Belajar Dari Eva Bande	100
Mewujudkan Kesejahteraan Kelompok Marginal melalui Akses Tanah Kas Desa	104
2.4 EKONOMI	110
Pendampingan Perempuan Purna Pekerja Migran Melalui Kelompok Usaha Bersama.....	111
Cemplon dan Pemberdayaan Perempuan dalam Mengatasi Dampak Pandemi	115
Hilangnya Para Penenun Perempuan	119
jalan Panjang Tanpa Ujung: Memperjuangkan Martabat Janda sebagai Perempuan Kepala Keluarga.....	124
2.5 INFRASTRUKTUR	129
Perempuan dan Kualitas Infrastruktur Desa	130
Memperjuangkan Infrastruktur Inklusif di Mataram	134
Belajar dari Riset Aksi Perempuan Penyandang Disabilitas	134
Keadilan untuk Penyandang Disabilitas di Ruang Pengadilan	139
2.6 KEBENCANAAN.....	144
Kepala Desa Perempuan Melawan Wabah.....	145
Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput Dalam Mitigasi Bencana.....	149
2.7 PERLINDUNGAN SOSIAL.....	154
Melindungi dan Peduli Pada Kelompok Lanjut Usia	155
2.8 PENDIDIKAN DAN RISET	160
Gerakan Advokasi Hak Disabilitas di Indonesia di masa Pandemi COVID-19.....	161
Aksi Kolektif Pengarusutamaan GEDSI dalam Penelitian	165

BAGIAN 3: EPILOG	171
Pembangunan yang Inklusif Butuh Pemihakan Kekuasaan.....	172
Catatan Reflektif Riset dan Advokasi GEDSI.....	176

Participatory Action Research: Metode Riset Berperspektif Feminis

Prof. Dr. Emy Susanti

Universitas Airlangga, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia

Feminisme adalah aliran pemikiran dan kesadaran tentang adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga, di tempat kerja, serta dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Kesadaran ini diikuti dengan tindakan secara sadar untuk mengubah ketidakadilan gender tersebut untuk mencapai suatu keadaan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Penelitian berperspektif feminis adalah penelitian yang mengimplementasikan kesadaran feminis yang tercermin dalam seluruh proses penelitian, dari penentuan topik, tujuan penelitian, perumusan masalah penelitian, kerangka teoretis, pemilihan metode penelitian, sampai peran peneliti dan yang diteliti.

Metodologi feminis berakar dari paradigma kritis (*critical paradigm*). Paradigma ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, memandang bahwa realitas sosial bersifat kompleks, diciptakan oleh manusia dan bukan oleh alam, penuh kontradiksi, serta berdasarkan tekanan dan eksploitasi.

Kedua, manusia mengalami alienasi, dieksploitasi, dibatasi, dikondisikan, dan dijauhkan dari penyadaran akan potensinya. Ketiga, kondisi yang membentuk kehidupan sosial dapat diubah menjadi lebih memberdayakan, berdasarkan nilai-nilai dan impresi akal. Keempat, tujuan penelitian adalah menjelaskan, menginterpretasikan, dan memberdayakan kehidupan sosial.

Metodologi penelitian feminis berawal dan berkembang dari ketidakpuasan para ahli dan aktivis feminis yang mengkritik kelemahan paradigma positivis. Pendekatan feminis melihat bahwa kehidupan perempuan tidak bisa diwakili laki-laki. Ilmu sosial tidak dapat bersifat netral terhadap permasalahan gender, ras, dan lain-lain. Bagi pendekatan feminis, *setting* sosial penting dan dapat berbeda bagi perempuan menurut tempat dan waktu. Pengetahuan tidak bisa netral, tetapi harus mampu menumbuhkan kesadaran.

Penelitian tidak menjadi otoritas mutlak peneliti. Karena itu, pendapat subjek yang diteliti terhadap realitas harus dipertimbangkan dalam penelitian.

Perspektif feminis telah menunjukkan bagaimana pendekatan tradisional berbasis paradigma positivis gagal mengungkap pengalaman hidup perempuan karena perempuan ditafsirkan oleh konsep dominan yang maskulin. Padahal perempuan memiliki kesadaran yang bersifat multidimensi sehingga kehidupan sehari-hari dan pengalaman hidup perempuan tidak dapat dipahami secara linear.⁷

Ahli feminis memulai penelitian dengan membongkar pengalaman individu yang bukan anggota kelompok dominan dengan tujuan membuka cara pemahaman baru dengan latar “suara yang terpinggirkan”. Harding⁸ menjelaskan bahwa pendekatan epistemologis feminis ini berkembang sebagai cara untuk menghindari pengetahuan seksis, kolonialis, rasis, dan heteroseksis, serta memulai pemikiran baru yang memperjuangkan kehidupan orang-orang yang terpinggirkan dengan tujuan memberdayakan mereka. Dengan demikian, perspektif feminis menekankan peran penelitian sebagai pendorong perubahan sosial.

Salah satu metodologi penelitian berperspektif feminis yang lazim digunakan adalah *participatory action research* (PAR), atau penelitian tindakan partisipatif. PAR menolak paradigma positivis yang melihat dunia sebagai realitas tunggal, dapat diamati dan diukur, di mana semua variabel dapat dikontrol dan dimanipulasi untuk menentukan hubungan sebab-akibat antarvariabel.

PAR adalah penelitian pada masyarakat yang menekankan partisipasi dan tindakan atau aksi yang berusaha memahami dunia dengan mencoba mengubahnya secara kolaboratif dan mengikuti siklus refleksi. Tindakan yang dihasilkan kemudian diteliti lebih lanjut dan siklus reflektif tersebut berulang: pengumpulan data, refleksi, tindakan, dan seterusnya.

Praktisi PAR melakukan upaya terpadu untuk mengintegrasikan tiga aspek dasar penelitian, yakni partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan demokrasi, tindakan dan aksi keterlibatan dengan pengalaman dan sejarah, serta pemikiran yang rasional-sistematis dan pengembangan pengetahuan. PAR bukanlah kumpulan ide dan metode yang monolitik, tetapi lebih merupakan orientasi pluralistik untuk mengembangkan pengetahuan dan perubahan sosial. PAR menggabungkan partisipasi dan tindakan untuk memahami dan menangani masalah-masalah sosial.

⁷ Riger, S. (1992). Epistemological debates, feminist voices: Science, social values, and the study of women. *American Psychologist*, 47(6), 730–740. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.6.730>

⁸ Harding, Sandra. (1993). Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?. *Feminist Epistemologies*, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.), New York: Routledge, 49–82.

Para feminis menggunakan PAR untuk mendorong perempuan, komunitas miskin, dan komunitas terpinggirkan memahami alasan struktural penindasan mereka. PAR tumbuh sebagai metodologi yang memungkinkan para peneliti bekerja dalam kemitraan dengan komunitas melalui tindakan nyata untuk mendorong perubahan. Para feminis merupakan pelopor pendekatan interseksional dengan melihat beban dan penindasan berlapis ketika perempuan atau kelompok marginal juga mengalami disabilitas. Dengan demikian, usulan perubahan yang diajukan dipastikan lebih inklusif.

PAR menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan data. Dalam PAR, tidak ada metode yang bersifat “superior” dan juga tidak ada metode yang dengan sendirinya bersifat feminis, karena metode hanyalah alat atau teknik.⁹ Seseorang tidak dapat mengklaim bahwa metode kualitatif, misalnya wawancara, secara inheren adalah “feminis”, atau bahwa metode kuantitatif, misalnya pengukuran survei, adalah “tidak feminis”. Semua metode dapat digunakan dengan cara yang seksis dan, sebaliknya, semuanya dapat digunakan untuk tujuan feminis.¹⁰

Inti PAR adalah penelitian reflektif-kolektif yang dilakukan peneliti dan sasaran penelitian sehingga mereka dapat memahami dan meningkatkan praktik di tempat mereka berpartisipasi dalam situasi di mana mereka berada. Proses reflektif yang terkait langsung dengan tindakan dipengaruhi pemahaman tentang sejarah, budaya, serta konteks lokal dan tertanam dalam hubungan sosial.

Proses PAR harus memberdayakan dan membuat orang memiliki kendali yang lebih besar atas hidup mereka. PAR melibatkan peneliti dan peserta yang bekerja bersama untuk memahami situasi bermasalah dan mengubahnya menjadi lebih baik. Tipe penelitian PAR memfokuskan pada perubahan sosial yang menentang realitas ketidaksetaraan; bersifat spesifik sesuai konteks, sering ditargetkan pada kebutuhan kelompok tertentu; memiliki siklus berulang dari penelitian, tindakan, dan refleksi; dan sering berupaya “membebaskan” sasaran penelitian agar memiliki kesadaran yang lebih besar tentang situasi mereka untuk mengambil tindakan. PAR dapat menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan analisis yang berbeda, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Misalnya, PAR untuk isu ketenagakerjaan perempuan. Berbeda dengan kebanyakan pendekatan lain, PAR didasarkan pada refleksi, pengumpulan data, dan tindakan yang bertujuan meningkatkan kapabilitas dan posisi tawar tenaga kerja perempuan serta

⁹ Harding, S. (1993). Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity? *Feminist Epistemologies*, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.), New York: Routledge, 49–82.

¹⁰ Peplau, L. A., & Conrad, E. (1989). Beyond nonsexist research: The perils of feminist methods in psychology. *Psychology of Women Quarterly*, 13(4), 379–400. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1989.tb01009.x>

mengurangi kesenjangan dengan melibatkan orang-orang yang akan dapat melakukan aksi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Contoh lain adalah PAR tentang kesehatan ibu dan bayi di perdesaan. Peneliti membangun dan memperkuat jejaring perempuan yang ada dan memainkan peran sebagai fasilitator. Siklus aksi masyarakat dikembangkan, masalah diidentifikasi dan dibuat daftar prioritasnya, perencanaan disusun bersama, dan rencana tersebut dilaksanakan, kemudian dievaluasi dengan cara partisipatif.

Dalam penelitian kesehatan mental psikologis, PAR telah digunakan untuk penelitian tentang respons perempuan korban kekerasan agar ikut merencanakan dan menjalankan pelayanan serta menentukan pilihan bentuk perawatan alternatif. Prinsip-prinsip PAR juga menjadi dasar dari evaluasi program yang ditujukan untuk kesehatan perempuan. Evaluasi program kesehatan perempuan diarahkan agar lebih demokratis, membangun kapasitas perempuan, dan mendorong perempuan melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Penerapan PAR pada penelitian masyarakat adat, misalnya, ditujukan untuk mendukung kelompok perempuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan mereka. Dengan dukungan dari tim peneliti, perempuan dari komunitas adat dapat bertindak bersama peneliti untuk mengeksplorasi masalah prioritas yang memengaruhi hidup mereka, mengenali sumber daya mereka, menghasilkan pengetahuan, dan melakukan aksi untuk memperbaiki kehidupan mereka. PAR yang diterapkan pada kelompok disabilitas akan mendekonstruksi pemikiran tentang konsep “kenormalan” dan membuka perspektif yang lebih luas mengenai persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi kelompok disabilitas dan bagaimana upaya pemenuhan hak disabilitas dilakukan dalam perspektif para penyandang disabilitas.

Proses PAR berlangsung dari refleksi dan tindakan yang menggabungkan observasi partisipan, diskusi informal, wawancara mendalam, serta umpan balik untuk peningkatan kesadaran diri, kepercayaan diri, dan harapan masa depan mereka. PAR juga mewajibkan peneliti bekerja dalam kemitraan erat dengan masyarakat sipil dan pembuat kebijakan.

Di Indonesia, tipe penelitian PAR diterapkan untuk membongkar isu-isu ketidakadilan pada subjek yang rentan, terpinggirkan, terabaikan dan terdiskriminasi, termasuk isu disabilitas. PAR merupakan proses penelitian dari hulu sampai hilir. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sangat mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sampai ke hilir (hilirisasi). Penelitian PAR dapat memenuhi kebutuhan penelitian topik kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, sekaligus memenuhi kriteria penelitian sampai ke hilir (hilirisasi). Mayoritas anggota ASWGI juga sudah menerapkan PAR.

PAR mengharuskan setiap pihak bekerja sama secara efektif mengelola agenda mitra yang berbeda dan kadang bersaing. Metode penelitian partisipatif harus dipilih secara saksama sehingga mampu mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat secara lebih mendalam dalam proses penelitian. Keterlibatan semacam ini memungkinkan PAR mendapatkan nilai lebih dari kemitraan kolektif antara peneliti dan komunitas, yang akan menciptakan temuan yang lebih bermakna.